

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sungai Mekong merupakan salah satu sungai lintas negara terpenting di Kawasan Asia Tenggara yang berperan strategis dalam menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah sekitarnya (Mekong River Commission, 2024). Sungai ini mengalir sepanjang lebih dari 4.300 kilometer dan melitasi enam negara *riparian*, yaitu Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Keberadaan sungai Mekong menjadikannya sumber utama bagi pertanian, perikanan, transportasi air, serta penyediaan air bersih bagi jutaan penduduk di masing-masing negara (United Nations Development Programme (UNDP), n.d.). Selain itu, sungai ini menjadi tulang punggung ekosistem regional yang menopang keanekaragaman hayati dan stabilitas lingkungan kawasan. Dengan fungsi yang sangat vital tersebut, Sungai Mekong tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam konteks hubungan internasional.

Selain fungsi sosial dan ekonomi, Sungai Mekong juga memiliki peran penting dalam sektor energi, khususnya sebagai sumber potensial pembangkit listrik tenaga air. Dalam beberapa dekade terakhir pembangunan pembangkit listrik tenaga air (Hydropower) di sepanjang aliran Sungai Mekong meningkat secara signifikan seiring dengan kebutuhan energi yang terus bertambah di negara-negara *riparian* (Mekong River Commission, 2024). Pemanfaat sungai untuk kepentingan energi ini

memperlihatkan keterkaitan era antara air dan energi. Di sisi lain, ketergantungan pada energi hidroelektrik menjadikan Sungai Mekong sebagai asset strategis dalam kebijakan pembangunan nasional negara-negara terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sungai tidak dapat dilepaskan dari agenda keamanan energi dan pembangunan jangka panjang kawasan.

Pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama memiliki arti strategis bagi negara-negara riparian karena sungai ini berfungsi tidak hanya sebagai sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber energi melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air. Dalam periode 2023-2025, intensitas pembangunan bendungan dan proyek energi air di kawasan Mekong terus meningkat, terutama di negara hulu dan tengah aliran sungai, sehingga menimbulkan berbagai dampak lintas batas seperti perubahan aliran air, degradasi lingkungan, dan potensi ketegangan antarnegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Mekong tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara, melainkan memerlukan kerja sama lintas batas yang melibatkan berbagai aktor.

Periode 2023-2025 merepresentasikan dinamika penting dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama. Tahun 2023 menandai awal koeksistensi antara Mekong River Commission (MRC) dan Lancang-Mekong Cooperation (LMC) sebagai dua kerangka kerja sama regional yang berjalan paralel dengan karakter dan kepentingan yang berbeda, sehingga membentuk konfigurasi tata kelola yang plural (Huang, 2023). Kondisi ini mendorong meningkatnya interaksi antar aktor, khususnya negara-negara riparian, dalam menyesuaikan kepentingan nasional

dengan tuntutan pengelolaan kolektif sumber daya air dan energi. Tahun 2024 ditandai oleh penguatan mekanisme koordinasi dan konsolidasi tata kelola, di mana interaksi antar aktor tidak hanya bersifat responsif terhadap dampak pembangunan energi air, tetapi juga diarahkan pada pembentukan dan penyesuaian norma, aturan, serta prosedur kerja sama regional. Sementara itu, tahun 2025 menjadi fase evaluatif yang memperlihatkan sejauh mana implementasi interaksi, institusi, dan mekanisme *Global Energy Governance* mampu mengelola Sungai Mekong secara berkelanjutan, adil, dan stabil di tengah kompleksitas kepentingan lintas batas.

Meskipun memiliki manfaat besar, pengelolaan Sungai Mekong merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks karena melibatkan kepentingan nasional yang beragam. Aktivitas pembangunan bendungan di wilayah hulu sering kali menimbulkan kekhawatiran di negara-negara hilir terkait perubahan debit air, berkurangnya sedimentasi, serta degradasi ekosistem. Dampak tersebut berpengaruh langsung terhadap sektor perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan masyarakat di wilayah hilir (Baran, Guerin, & Nasielski, 2015). Perbedaan kepentingan ini kerap memicu ketegangan politik dan potensi konflik antarnegara *riparian*. Dengan demikian, Sungai Mekong menjadi contoh nyata bagaimana sumber daya alam bersama dapat memicu konflik dalam hubungan internasional.

Sensitivitas pengelolaan Sungai Mekong semakin meningkat akibat lemahnya mekanisme koordinasi dan kepatuhan dalam kerangka kerja sama lintas negara, di mana perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan kapasitas institusional, serta keterbatasan aturan yang bersifat mengikat menghambat pengelolaan bersama di

tingkat regional (Huang, 2023). Tidak semua negara *riparian* memiliki memiliki tingkat partisipasi dan komitmen yang sama dalam mekanisme kerja sama antar negara. Selain itu, lemahnya penegakan aturan membuat kesepakatan regional sering bersifat normatif dan kurang implemetatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Mekong bukan semata persoalan teknis, tetapi juga persoalan politik dan tata kelola internasional.

Dalam konteks tersebut pendekatan *global energy governance* menjadi relevan untuk menganalisis pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama. Teori *global energy governance* yang dikembangkan oleh Thijs Van de Graaf dan Jeff Colgan (2016) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya startegis lintas batas memerlukan ketelibatan berbagai aktor. Aktor tersebut tidak hanya negara, tetapi juga institusi internasional, organisasi internasional, organisasi regional, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Van de Graaf, 2016). Pendekatan ini menyotori pentingnya norma, aturan, dan mekanisme koordinasi dalam mengelola sumber daya global. Dengan demikian pengelolaan Sungai Mekong dapat dipahami sebagai proses kolektif yang melampaui kedaulatan negara semata.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengolahan sumber daya air sungai Mekong. Contohnya seperti jurnal karya Weiwei Huang (2023) dalam jurnal berjudul “*Cooperative Governance of Transboundary Water in Greater Mekong Subregion: Challenges in the Lancang-Mekong Cooperation*” menyimpulkan bahwa pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Meskipun mekanisme Lancang–

Mekong Cooperation (LMC) menyediakan wadah dialog antarnegara riparian, implementasinya dibatasi oleh ketimpangan kekuatan politik dan ekonomi antara negara hulu dan hilir, serta ketiadaan mekanisme yang mengikat secara hukum. Kondisi ini menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan bersama dan membuat kerja sama cenderung bersifat koordinatif, sehingga tanpa penguatan institusi, transparansi data, dan mekanisme kepatuhan yang lebih tegas, pengelolaan Sungai Mekong sulit mencapai prinsip keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh negara riparian (Huang, 2023).



Gambar 1.1 Peta hydropower Sungai Mekong

Sumber : Hobomaps.com

Pembangkit listrik tenaga air (hydropower) di Sungai Mekong tersebar dari bagian hulu hingga hilir sungai dan melibatkan beberapa negara riparian. Di bagian hulu (Upper Mekong/Lancang) yang berada di Tiongkok, terdapat banyak bendungan besar di sepanjang sungai Lancang seperti Xiaowan, Nuozhadu, dan Jinghong, yang berfungsi untuk pembangkitan listrik dan pengaturan aliran air sungai (Mekong River Commission, 2024). Memasuki Lower Mekong Basin, Laos menjadi pusat utama pembangunan hydropower di alur utama Sungai Mekong, dengan proyek besar seperti Xayaburi Dam di Provinsi Sayaburi dan Don Sahong Dam di wilayah Siphandone dekat perbatasan Kamboja yang sudah beroperasi sejak 2019–2020, serta beberapa proyek seperti Pak Beng, Luang Prabang, dan Sanakham yang sedang dalam tahap perencanaan atau proses konsultasi PNPCA Mekong River Commission (Hobo Maps, n.d.). Sementara itu, banyak negara di kawasan mengembangkan hydropower di anak-anak sungai atau tributaries seperti Nam Theun 2 di Laos yang berada di sungai cabang Mekong, yang juga berkontribusi terhadap kapasitas pembangkit di daerah aliran sungai. Persebaran proyek-proyek ini menunjukkan bahwa pengembangan hydropower di Sungai Mekong bersifat lintas batas.

Dalam hal ini penulis memilih Mekong River Commission (MRC) sebagai representasi *global energy governance* karena MRC memiliki tingkat institusionalisasi yang lebih kuat dan sesuai dengan definisi Global Energy Governance menurut Thijs Van de Graaf, yaitu adanya institusi formal, aturan yang terlembaga, serta mekanisme koordinasi untuk mengelola interdependensi energi lintas negara. MRC dibentuk melalui Mekong Agreement 1995 dan memiliki kerangka hukum, prosedur resmi

seperti PNPCA (*Prior Notification, Prior Consultation and Agreement*), serta mandat eksplisit dalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi basis produksi energi hydropower di kawasan Mekong.

Jurnal yang membahas mengenai sensitivitas konflik Sungai Mekong karya Jing Wei, Yongping Wei, Fuqiang Tian, Natalie Nott, Claire de Wit, Liying Guo, dan You Lu dalam jurnal yang berjudul “*News media coverage of conflict and cooperation dynamics of water events in the Lancang-Mekong River basin*” yang berkesimpulan bahwa hubungan antarnegara di Kawasan Sungai Mekong lebih sering ditandai oleh upaya kerjasama dibandingkan konflik terbuka, terutama dalam pengelolaan sumber daya air Bersama. Namun demikian, isu-isu tertentu seperti pembangunan bendungan dan pengaturan aliran air tetap menjadi sumber ketegangan karena menimbulkan dampak yang berbeda bagi setiap negaranya, khususnya negara hulu dan hilir. Perbedaan kepentingan nasional, posisi geografis, dan cara masing-masing negara memandang serta merespon isu air membuat Sungai Mekong menjadi Kawasan yang sensitive terhadap potensi konflik, sehingga kerjasama dan komunikasi lintas negara tetap menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaannya (Jing Wei, 2021)

Jurnal terdahulu yang menggunakan konsep *global energy governance* adalah karya X. Cao, Y. Li, dan X. Sun yang diterbitkan pada tahun 2022 dalam jurnal BCP Business & Management dengan judul “*Energy Governance in Asia in the Post-Epidemic Era: A Case Study of the AIIB*”. Artikel ini menggunakan lensa tata kelola energi global untuk menganalisis peran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

dalam konstelasi energi Asia pasca pandemi. Penulis membahas bagaimana institusi regional seperti AIIB mampu memfasilitasi kerja sama lintas negara dalam pembiayaan dan pengembangan proyek energi, khususnya dalam mendukung transisi menuju energi bersih. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya koordinasi regulasi, investasi, dan kebijakan di antara negara-negara anggota guna mengatasi dampak pandemi sekaligus mempercepat adopsi energi bersih. Hasil analisis menunjukkan bahwa AIIB, sebagai lembaga multilateral dengan kapasitas finansial dan jaringan regional yang kuat, berpotensi menjadi aktor kunci dalam memperkuat tata kelola energi regional, meningkatkan efisiensi kolaborasi, serta mendorong pengembangan proyek energi terbarukan secara kolektif (Cao, 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, penulis dapat merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana penerapan *global energy governance* dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama negara-negara *riparian* melalui Mekong River Commission pada periode 2023-2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar S1 pada jurusan Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas

pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan karakteristik tata kelola global dalam pengolahan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama pada periode 2023-2025 dengan menggunakan pendekatan *global energy governance* Thijs Van de Graaf dan Jeff Colgan (2016). Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme kerja sama lintas negara serta peran berbagai aktor, termasuk negara riparian, institusi internasional, organisasi regional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam struktur dan proses pengambilan keputusan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Global Energy Governance*

Global energy governance merupakan kerangka tata kelola yang menjelaskan bagaimana sektor energi diatur melalui interaksi kompleks antara negara, organisasi internasional, institusi regional, serta aktor non-negara di tingkat global dan regional. Menurut Thijs van de Graaf (2016), tata kelola energi tidak lagi dapat dipahami sebagai kewenangan nasional semata, melainkan sebagai hasil dari keterhubungan berbagai rezim, institusi, dan norma yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi energi. *Global energy governance* menekankan pentingnya koordinasi lintas batas karena energi memiliki dampak transnasional yang berkaitan erat dengan isu keamanan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pengambilan

keputusan energi dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kapasitas kelembagaan antaraktor. Pendekatan *Global energy governance* juga menggarisbawahi perlunya legitimasi, dan keadilan dalam tata kelola energi agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, *global energy governance* berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana kepentingan energi global dinegosiasikan dan dikelola secara kolektif (Van de Graaf, 2016).

1.4.1.1 Domestic-International interactions

Dalam perspektif *global energy governance* menurut Thijs van de Graaf dan Jeff Colgan (2016), konsep ini memiliki kerangka yang merujuk pada keterlibatan berbagai aktor domestic dan internasional dalam pengaturan energi di tingkat global. Mereka menegaskan bahwa tata kelola energi global tidak lagi bersifat state-centric, melainkan terbentuk dari interaksi kompleks antara negara produsen dan konsumen energi, organisasi internasional, forum informal, lembaga keuangan, perusahaan energi, serta aktor masyarakat sipil. Keberadaan banyak aktor ini muncul karena isu energi mencakup beragam kepentingan seperti keamanan pasokan, stabilitas pasar, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan yang tidak dapat dikelola oleh satu aktor tunggal. Van de Graaf dan Colgan menunjukkan bahwa arsitektur tata kelola energi global bersifat terfragmentasi dan tidak terpusat pada satu institusi dominan, sehingga peran aktor tersebar dalam berbagai rezim dan forum kerja sama. Kondisi multi aktor ini menciptakan ruang kolaborasi sekaligus kompetisi antaraktor dalam menentukan agenda, aturan, dan prioritas kebijakan energi global. Selain itu, aktor non-

negara semakin berpengaruh dalam mendorong norma baru seperti transisi energi bersih, keadilan energi, dan tanggung jawab lingkungan (Van de Graaf, 2016).

1.4.1.2 Private Actors and Transnational Governance

Dalam kerangka *Private Actors and Transnational Governance*, peran aktor non-negara menjadi sentral dalam tata kelola energi global. Aktor privat seperti perusahaan multinasional, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah (NGO), dan jaringan industry dipahami sebagai entitas yang memiliki kapasitas signifikan dalam membentuk aturan, standar, dan praktik di sektor energi lintas negara. Dalam perspektif ini, tata kelola energi tidak hanya dijalankan melalui organisasi internasional resmi atau forum antarnegara, tetapi juga melalui mekanisme transnasional yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali informal. Aktor privat berperan dalam menciptakan norma, mendorong inovasi teknologi, serta memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi di luar kerangka negara. Mereka juga terlibat dalam pembentukan standar keberlanjutan, skema sertifikasi, serta inisiatif sukarela yang berdampak langsung pada praktik industri energi global. Pendekatan ini menekankan bahwa tata kelola energi global bersifat polisentris dan tersebar, di mana otoritas tidak terpusat pada satu aktor atau institusi tunggal, melainkan terbentuk melalui interaksi kompleks antara aktor publik dan privat di berbagai tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini mencerminkan meningkatnya peran jaringan transnasional dalam merespons tantangan energi yang mencakup keamanan pasokan, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (Van de Graaf, 2016)

1.4.2 Tujuan Utama GEG dan Cara Mencapainya

1.4.2.1 *Security of Energy Supply and Demand*

Security of energy supply merujuk pada kemampuan sistem energi global untuk menjamin ketersediaan pasokan energi yang stabil, berkelanjutan, dan tidak terganggu. Keamanan pasokan ini menjadi krusial karena energi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional (IEA , 2022). Gangguan pasokan dapat disebabkan oleh konflik geopolitik, ketegangan transit lintas negara, bencana alam, membangun mekanisme koordinasi seperti cadangan strategis, transparansi data pasar, serta kerja sama multilateral untuk memitigasi risiko tersebut. Dengan demikian, *security of energy supply* dalam kerangka *global energy governance* bertujuan menciptakan sistem energi internasional yang tangguh terhadap guncangan dan mampu menjamin kontinuitas pasokan bagi negara-negara di dunia (International Renewable Energy Agency, 2023). Contohnya seperti mengelola cadangan minyak bumi untuk meredam guncangan energi (mengkoordinasikan pelepasan cadangan minyak strategis negara-negara anggota IEA) dan berbagi informasi pasar energi (melalui Joint Organisations Data Initiative) (Van de Graaf, 2016).

1.4.2.2 *Economic Development*

Economic development sebagai salah satu tujuan *global energy governance* berkaitan erat dengan bagaimana tata kelola energi internasional mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara. Energi dipandang sebagai input fundamental bagi industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan peningkatan produktivitas. Ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau

memungkinkan negara berkembang memperluas akses listrik, mendorong investasi, dan mengurangi kemiskinan energi (World Bank, 2023). Selain itu, tata kelola global berperan dalam menciptakan aturan dan koordinasi yang dapat meminimalkan volatilitas harga serta meningkatkan efisiensi pasar energi internasional. Dengan demikian, dimensi *economic development* dalam *global energy governance* menekankan bahwa pengelolaan energi global tidak hanya soal keamanan pasokan, tetapi juga tentang menciptakan sistem energi yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations Development Programme, 2022). Contohnya seperti mengurangi kemiskinan energi (misalnya melalui program elektrifikasi pedesaan), dan memfasilitasi transfer teknologi dan kerjasama (program efisiensi energi dan berbagi teknologi nuklir) (Van de Graaf, 2016).

1.4.2.3 *International Security*

International security sebagai salah satu tujuan *global energy governance* berkaitan dengan bagaimana energi dapat menjadi sumber konflik maupun kerja sama antarnegara. Ketergantungan pada impor energi, persaingan atas sumber daya strategis, serta kontrol atas jalur transit dapat memicu ketegangan geopolitik (World Economic Forum, 2023). Oleh karena itu, tata kelola energi global berupaya mengurangi risiko konflik melalui mekanisme dialog, koordinasi kebijakan, dan institusi internasional yang memfasilitasi kerja sama. Energi juga dapat menjadi alat diplomasi yang memperkuat hubungan antarnegara apabila dikelola melalui aturan dan norma yang jelas. Dengan demikian, dimensi *international security* dalam *global energy governance* menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan internasional

dalam menjaga sistem energi global tetap aman dan berfungsi dengan baik. Contohnya seperti mengurangi proliferasi nuklir, terorisme nuklir, dan kecelakaan nuklir sipil. Dan memitigasi serangan teroris terhadap pipa dan infrastruktur energi (Van de Graaf, 2016)

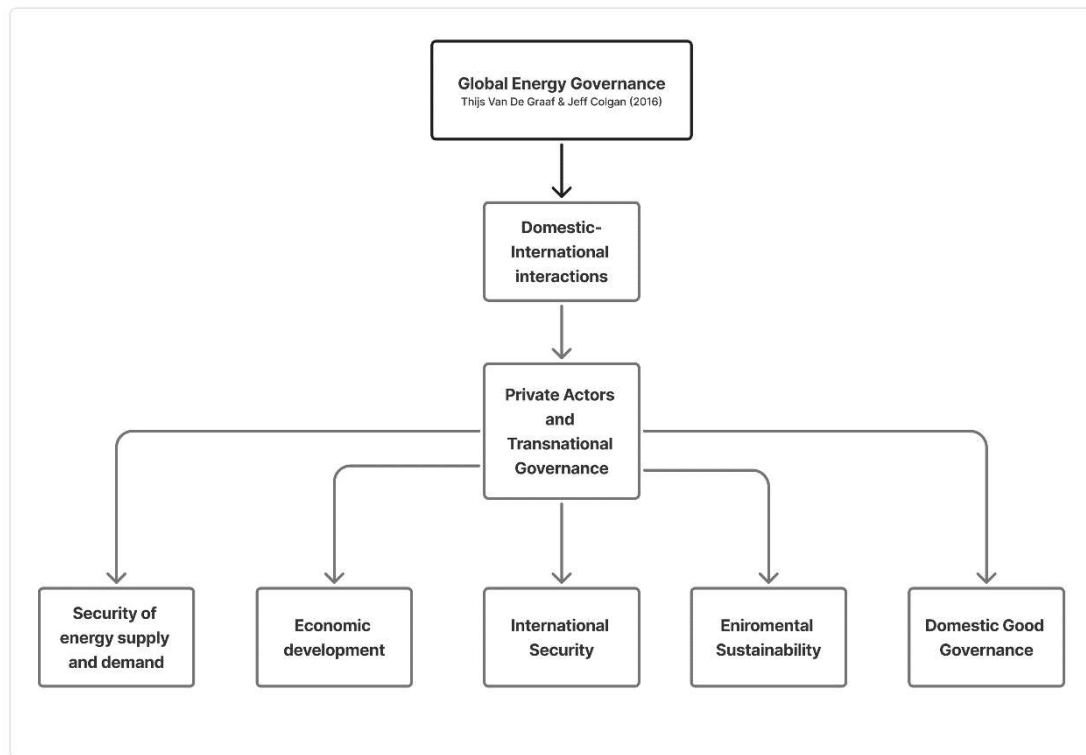
1.4.2.4 *Environmental Sustainability*

Thijs van de Graaf dan Jeff Colgan menempatkan *environmental sustainability* sebagai salah satu tujuan utama *global energy governance* yang menekankan pentingnya mengurangi dampak lingkungan dari sistem energi global. Produksi dan konsumsi energi, khususnya yang berbasis bahan bakar fosil, berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim, polusi udara, dan degradasi lingkungan (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023). Oleh karena itu, tata kelola energi global perlu mengintegrasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim, transisi menuju energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi. Upaya ini memerlukan koordinasi internasional karena emisi dan dampak lingkungan bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Dengan demikian, dimensi *environmental sustainability* dalam *global energy governance* bertujuan menciptakan sistem energi yang tidak hanya aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Contohnya seperti memfasilitasi kerjasama dalam penanganan perubahan iklim global, memfasilitasi kebijakan penetapan harga karbon (*carbon pricing*) dan mengembangkan sumber energi terbarukan, pasar energi, serta regulasi yang mendukungnya (Van de Graaf, 2016).

1.4.2.5 *Domestic Goods Governance*

Domestic good governance merupakan tujuan yang menekankan pentingnya tata kelola energi yang transparan, akuntabel, dan efektif di tingkat nasional sebagai fondasi dari tata kelola energi global (World Bank, 2022). Pengelolaan sektor energi yang baik di dalam negeri mencakup regulasi yang jelas, institusi yang kuat, pemberantasan korupsi, serta pengelolaan pendapatan energi yang bertanggung jawab. Negara yang memiliki tata kelola domestik yang lemah cenderung menghadapi masalah seperti mismanajemen sumber daya, konflik internal, dan ketidakstabilan ekonomi (World Bank, 2022). Kondisi tersebut dapat berdampak pada pasar energi internasional dan mengganggu stabilitas global. Oleh karena itu, dalam kerangka global energy governance, penguatan tata kelola domestik dipandang sebagai prasyarat penting untuk menciptakan sistem energi global yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Contohnya mendorong transparansi dalam pasar energi dan tata kelola energi (Van de Graaf, 2016).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Bagan sintesa *Global Energy Governance* Thijs Van de Graaf 2016

Global energy governance melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional, regional, dan internasional (Van de Graaf, 2016). Negara-negara riparian yaitu Tiongkok sebagai negara hulu serta Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam sebagai negara tengah dan hilir merupakan aktor utama karena memiliki kedaulatan teritorial sekaligus tanggung jawab atas dampak lintas batas dari kebijakan energi dan pemanfaatan air. Selain negara, institusi regional seperti Mekong River Commission (MRC) berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi kebijakan, pertukaran data hidrologi, serta konsultasi pembangunan energi air. Keterlibatan aktor non-negara, termasuk organisasi lingkungan, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil, juga

diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata kelola Sungai Mekong (Hensengerth, 2015). Selain komponen diatas ada 5 goals dari Global Energy Governance yaitu *Security of energy supply* tercermin dari upaya negara-negara riparian menjaga stabilitas produksi listrik tenaga air agar pasokan energi regional tetap terjamin meskipun terdapat dinamika politik dan lingkungan. *Economic development* terlihat dari pemanfaatan PLTA sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor listrik, dan pembangunan infrastruktur kawasan. *International security* berkaitan dengan potensi konflik maupun kerja sama antarnegara hulu-hilir yang dikelola melalui mekanisme dialog dan koordinasi di bawah Mekong River Commission. *Environmental sustainability* menjadi krusial karena pembangunan bendungan harus mempertimbangkan dampak ekologis lintas batas, termasuk keberlanjutan ekosistem dan ketahanan air. Sementara itu, *domestic good governance* menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan energi air di masing-masing negara anggota agar tata kelola regional melalui MRC berjalan efektif dan selaras dengan prinsip *global energy governance*.

1.6 Argumentasi Utama

Pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya energi air menempatkannya sebagai *common resource* yang memiliki dampak lintas batas, sehingga menuntut tata kelola bersama yang adil dan berkelanjutan di antara negara-negara riparian yaitu Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerangka global energy governance, pengelolaan ini melibatkan komponen *Domestic-iterational*

interaction yang bersepakat untuk membentuk institusi yaitu MRC. Dimensi *Domestic-interational interaction* tercermin dari keterlibatan negara negara *riparian* yaitu tidak hanya negara, tetapi juga institusi regional seperti Mekong River Commission (MRC) dan serta aktor seperti organisasi lingkungan seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF), lembaga penelitian contohnya seperti Stockholm Environment Institute (SEI), *Private Actor* seperti Electricite du Laos, dan masyarakat sipil yang berperan dalam pengawasan, pertukaran data, dan advokasi keberlanjutan (World Wide Fund for Nature, 2023). Dimensi institusional menekankan pentingnya forum regional yang inklusif dan kredibel untuk mengoordinasikan kebijakan energi dan lingkungan berbasis data serta menjembatani kepentingan nasional dan regional, meskipun kapasitas legitimasi dan kepatuhan institusi tersebut masih perlu diperkuat sehingga terbentuklah MRC sebagai institusi yang menyediakan hal-hal tersebut sekaligus menjaga keadilan pengelolaan sumber daya air di Sungai Mekong (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2022).

Adanya MRC ini bertujuan untuk mewujudkan *Security of Energy Supply and Demand, Economic Development, International Security, Enviromental Sustainability, dan Domestic Good Governance*. Dalam hal *Security of energy supply* MRC mendukung pengembangan hydropower sebagai sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik di negara-negara anggota riparian dan MRC juga memfasilitasi konsultasi dan pertukaran informasi antar pemerintah anggota untuk meminimalkan konflik dan memastikan keputusan energi dibuat dengan pertimbangan dampak regional (Mekong River Commission, 2021). MRC dalam hal *International Security*

juga menyediakan forum diplomatik bagi negara-negara anggota dengan mekanisme konsultasi seperti PNPCA (*Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement*) berfungsi sebagai alat *confidence-building* agar proyek energi tidak memicu ketegangan politik. Untuk tujuan environmental sustainability mrc menyusun *Basin Development Strategy* untuk mengintegrasikan pembangunan energi (terutama hydropower) dengan perlindungan ekosistem, perikanan dan ketahanan pangan. Pada *Domestic Good Governance* MRC mendorong transparansi kebijakan energi dan air yang mengharuskan data hidrologi dan informasi proyek bendungan melalui mekanisme PNPCA, hal ini menekan praktik pengambilan keputusan sepihak di tingkat nasional dan meningkatkan keterbukaan publik. Transparansi kebijakan energi dan air dalam kerangka Mekong River Commission (MRC) diwujudkan melalui kewajiban pertukaran data hidrologi, pelaporan rencana pembangunan bendungan, serta konsultasi antarnegara sebelum proyek dilaksanakan. Mekanisme ini dijalankan melalui PNPCA yang mengharuskan negara anggota menyampaikan informasi teknis dan potensi dampak proyek kepada negara riparian lainnya sehingga memungkinkan evaluasi bersama dan mencegah pengambilan keputusan sepihak. Praktik transparansi tersebut memiliki dasar hukum dalam *Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin* (1995), yang mengatur kewajiban pemberitahuan, konsultasi, dan kerja sama dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya bersama (Mekong river Commission, 1995).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, pola interaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengolahan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama pada periode 2023-2025. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana tata kelola lintas batas dibentuk, dijalankan, dan dikoordinasikan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Mekong. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci bentuk pengelolaan Sungai Mekong, mekanisme kerja sama regional, serta peran negara, institusi regional, dan aktor non-negara dalam kerangka tata kelola global. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori *global energy governance* menurut Van de Graaf dan Colgan (2016), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor multipihak dan koordinasi lintas tingkat dalam pengelolaan isu global (Van de Graaf, 2016).

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data, dengan menelaah dokumen resmi negara-negara *riparian*, laporan dan publikasi Mekong River Commission (MRC), laporan organisasi internasional, berita internasional, serta jurnal akademik yang relevan dengan pengelolaan sumber daya air lintas batas. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif Pemanfaatan sumber tertulis yang beragam memungkinkan penelitian ini memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai praktik dan tantangan penerapan *global energy governance* dalam pengolahan Sungai Mekong sebagai sumber daya air

bersama pada periode 2023-2025.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis tata kelola global (global energy governance) dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama (shared water resources) pada periode 2023-2025. Secara geografis, penelitian mencakup kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mekong yang melibatkan Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, dengan penekanan pada kerja sama lintas negara dalam mengelola kepentingan bersama. Kajian ini menyoroti peran institusi regional, khususnya Mekong River Commission (MRC), serta keterlibatan aktor non-negara dalam membentuk mekanisme koordinasi, norma, dan kebijakan pengelolaan Sungai Mekong. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan Sungai Mekong sebagai arena interaksi kepentingan politik, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka tata kelola global.

Secara konseptual penelitian ini menggunakan perspektif global energy governance sebagaimana dikemukakan oleh Thijs van de Graaf (2016), dengan fokus pada fragmentasi aktor, aturan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan isu lintas batas. Penelitian dibatasi pada aspek politik internasional dan institusional, seperti koordinasi kebijakan, distribusi kewenangan, serta implementasi kerja sama antarnegara, tanpa membahas aspek teknis hidrologi atau kajian biofisik lingkungan. Pembatasan pada periode 2023-2025 karena Sungai Mekong menghadapi situasi yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, pembangunan infrastruktur besar, dan lemahnya koordinasi tata kelola lintas batas, terutama yang berkaitan dengan

aktivitas di negara-negara hulu seperti Tiongkok (China) dan Myanmar, serta negara hulu tengah seperti Laos. Tahun 2023 ditandai oleh dampak kekeringan dan semakin kuatnya pengaruh operasi bendungan di wilayah hulu Tiongkok dan Laos terhadap pola aliran, sedimentasi, dan ekosistem sungai di negara hilir. Pada 2024, pengelolaan pelepasan air bendungan oleh negara hulu serta pembangunan proyek energi air dan infrastruktur baru kembali memicu kekhawatiran dampak lintas batas, termasuk banjir ekstrem dan gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat di Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Memasuki 2025, tekanan tersebut berlanjut dengan pembangunan dan pengoperasian bendungan yang masih berlangsung di Laos dan wilayah hulu, serta meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan Delta Mekong di Vietnam. Secara keseluruhan, periode ini menegaskan pentingnya tata kelola regional yang lebih kuat dan mengikat dalam mengelola Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen, mengingat fokus kajian berada pada tata kelola global dan kerja sama internasional dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama. Data diperoleh dari dokumen resmi seperti perjanjian internasional terkait Sungai Mekong, laporan dan publikasi Mekong River Commission (MRC), serta dokumen kebijakan dan pernyataan resmi negara-negara yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mekong pada periode 2023-2025. Penggunaan dokumen resmi tersebut memungkinkan peneliti

memahami struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang berlaku dalam pengelolaan Sungai Mekong.

Selain itu, data dikumpulkan melalui studi literatur akademik yang mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *global energy governance*, *transboundary water governance*, serta pengelolaan sumber daya air lintas negara. Literatur ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan memperkuat analisis teoritis dengan mengacu pada perspektif *global energy governance* sebagaimana dikemukakan oleh Thijs van de Graaf (2016), sehingga analisis yang dihasilkan bersifat sistematis, aktual, dan relevan dengan konteks pengelolaan Sungai Mekong tahun 2023-2025. Dengan demikian, kombinasi sumber data tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap praktik dan tantangan tata kelola global Sungai Mekong.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif, yaitu proses analisis yang berangkat dari konsep atau teori umum menuju pemahaman atas fenomena empiris yang lebih spesifik. Penelitian ini menjadikan konsep *global energy governance* sebagai kerangka teoretis utama untuk menganalisis dinamika pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama dalam periode 2023-2025.

Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi prinsip, aktor, mekanisme tata kelola, serta norma yang terkandung dalam teori *global energy governance*, kemudian membandingkannya dengan praktik nyata dalam kerja sama

lintas negara di kawasan Sungai Mekong. Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder, seperti dokumen kebijakan, laporan institusi regional, publikasi akademik, serta pernyataan resmi negara-negara riparian, dianalisis untuk melihat sejauh mana praktik pengelolaan Sungai Mekong mencerminkan prinsip tata kelola energi global.

Selanjutnya, penelitian ini mengategorikan data berdasarkan dimensi utama *global energy governance*, seperti peran aktor negara dan non-negara, mekanisme koordinasi regional, kerangka regulasi, serta pola kerja sama transnasional. Melalui pendekatan deduktif, teori tidak hanya digunakan sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai untuk menganalisis, tantangan, dan implikasi tata kelola Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan teoritis mengenai praktik pengelolaan Sungai Mekong dalam konteks tata kelola energi global.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam 4 bab, untuk menjelaskan isi dan pembahasan terkait kasus yang dipilih. Berikut penjabaran isi setiap babnya :

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa penulisan, argumen utama penulis, teknik dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang pengaplikasian pendekatan *global energy governance* melalui kerangka *Domestic-International Interaction* dan *Private Actor and Transnational Government* dalam pengelolaan sumber daya air bersama sungai Mekong.

BAB III membahas tentang IMPLEMENTASI MEKONG RIVER COMMISSION
DALAM GLOBAL ENERGY GOVERNANCE PENGELOLAAN SUMBER DAYA
SUNGAI MEKONG

BAB IV berisi penutup, kesimpulan, dan saran dari analisa BAB I hingga BAB III.